

**LEGALITAS PENYITAAN TANAH MILIK PERUSAHAAN
SAAT NEGARA BERADA DALAM KEADAAN DARURAT
MILITER TAHUN 1966
(Studi Hukum Kritis : Hak Menguasai Negara Atas Inbreng di
PT PP Berdikari)**

TESIS

Oleh

HOTMAN CAPANDI SINAGA, S.H.
NIM : 2002190078



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKATA
2023**

**LEGALITAS PENYITAAN TANAH MILIK PERUSAHAAN
SAAT NEGARA BERADA DALAM KEADAAN DARURAT
MILITER TAHUN 1966 (Studi Hukum Kritis : Hak Menguasai
Negara Atas Inbreng di PT PP Berdikari)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Universitas
Kristen Indonesia

Oleh

HOTMAN CAPANDI SINAGA, S.H.
NIM : 2002190078



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HOTMAN CAPANDI SINAGA, S.H.

NIM : 2002190078

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “LEGALITAS PENYITAAN TANAH MILIK PERUSAHAAN SAAT NEGARA BERADA DALAM KEADAAN DARURAT MILITER TAHUN 1966 (Studi Hukum Kritis : Hak Menguasai Negara atas Inbreng di PT PP Berdikari)” adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, Tinjauan lapangan, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara refrensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang di nyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Mei 2023



HOTMAN CAPANDI
SINAGA, S.H.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

LEGALITAS PENYITAAN TANAH MILIK PERUSAHAAN SAAT NEGARA
BERADA DALAM KEADAAN DARURAT MILITER TAHUN 1966 (studi
hukum kritis : hak menguasai negara atas inbreng di PT PP Berdikari)

Oleh

Nama : HOTMAN CAPANDI, SH
Nim : 2002190078
Program studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang
tugas akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Jakarta Tanggal 25 Mei 2023
Mengetahui

Pembimbing I

Prof. Dr. John Pieris, S.H, M.H, M.S

Pembimbing II

Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H, M.H, M.Kn, M.Sc

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H, M.H.

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Barnadetha Nadeak, M.Pd., PA.



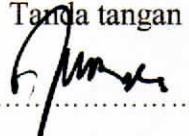
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal : 25 Mei 2023 Telah diselenggarakan sidang tugas akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan Akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : HOTMAN CAPANDI, SH
Nim : 2002190078
Program studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Hukum Pidana

Termaksud ujian Tugas Akhir yang berjudul : LEGALITAS PENYITAAN TANAH MILIK PERUSAHAAN SAAT NEGARA BERADA DALAM KEADAAN DARURAT MILITER TAHUN 1966 (studi hukum kritis : hak menguasai negara atas inbreng di PT PP Berdikari) oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof, Dr, John Pieris, S.H, M.H, M.S	Sebagai ketua Penguji	
2. Dr, Diana R.W. Napitupulu, S.H, M.H, M.Kn, M.Sc	Sebagai anggota I	
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Sebagai anggota II	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HOTMAN CAPANDI, S.H.
Nim : 2002190078
Fakultas : Program Pascasarjana
Program studi : Magister Hukum
Jenis Tugas akhir : Tesis
Judul : Legalitas Penyitaan Tanah Milik Perusahaan saat Negara berada dalam Keadaan Darurat Militer tahun 1966 (Studi Hukum Kritis : Hak Menguasai Negara atas Inbreng di PT PP Berdikari)

Menyatakan Bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya, dengan arahan dari Dosen pembimbing, dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapat gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan di cantumkan sebagai refrensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Saya memberikan hak noneksklusif tanpa royalti kepada Universitas Kristen Indonesia, yang berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari di temukan Pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku

Dibuat di : Jakarta

Tanggal : 25 Mei 2023

Yang menyatakan



HOTMAN CAPANDI
SINAGA, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan karunianya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia program Pascasarjana. Peneliti menyadari bahwa tanpa izin dari Tuhan Yme serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama keluarga dan pihak lainnya maka tentunya peneliti akan menemukan kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Tuhan Yme yang telah memberikan rahmatNya dalam menyelesaikan tesis ini serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti diantaranya kepada :

1. Dr Dhaniswara K Harjono S.H, M.H, M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ketua program studi magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Prof, Dr, John Pieris, S.H, M.H, M.S selaku Ketua Program Doktor Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga selaku Dosen pembimbing 1
4. Dr, Diana R.W. Napitupulu, S.H, M.H, M.Kn, M.Sc selaku Dosen pembimbing 2
5. Para Dosen Pengajar pada Magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia
6. Ir Gatot Harsono, MM selaku senior vice Presiden (SVP) aset management PT Pertamina (persero) dan Dr Ling Sodikin, M.H, M.kn, CN selaku staf ahli pertanahan PT Pertamina (persero) yang telah memberikan dukungan rekomendasi penulis mengambil kuliah S2 Ilmu Hukum Universitas kristen Indonesia untuk memperdalam wawasan cara penyelesaian senketa aset PT Pertamina (persero) yang bermasalah.
7. Orang tua peneliti Almarhum Mayor Polisi A Sinaga dan ibu Almarhum Rosmaida Panjaitan yang telah tiada di dunia ini tetapi rasa selalu ada mendampingi dan mendoakan anak dan cucunya, tidak pernah terlupakan semasa hidup selalu memberikan semangat dan tidak pantang menyerah terhadap suatu hal, dan tidak pernah kenal lelah dalam mendidik,

menyayangi, mendukung, memberi semangat dan mendoakan peneliti untuk mengejar kemuliaan Ilmu yang bermanfaat.

8. Abang Kandung dan kakak ipar peneliti Ir Togi MS Sinaga dan Linda Hutapea yang selalu memberikan suport untuk melanjutkan perkuliahan ke Magister ilmu Hukum.
9. Istri dan anak peneliti, Istri peneliti Helen Tambunan, dan anak-anak peneliti Jonathan B Satya Sinaga, dan Jesica Corini Rumondang Sinaga. Yang juga selalu memberikan dukungan semangat selama perkuliahan berlangsung
10. Atasan peneliti Ajun Komisaris Besar Polisi Petrus P, Silalahi, S.H. S.I.K. selaku Kasubdit dan Kompol Tri Buana Yudha, S.H., S.I.K selaku kanit 3 Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang selalu memberikan supor dalam penulisan & penelitian yang dilakukan peneliti.
11. Pihak pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penulisan tesis ini.

Pada akhirnya peneliti berharap Tuhan Yme berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis dan peneliti berharap agar semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 25 Mei 2023

Peneliti

HOTMAN CAPANDI
SINAGA, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	2
B. Perumusan masalah.....	16
C. Tujuan penelitian.....	17
D. Metode penelitian.....	17
1. Sifat penelitian	18
2. Lokasi penelitian.....	18
3. Narasumber.....	20
4. Jenis data	20
5. Studi dokumen dan pengumpulan data.....	25
6. Analisa data.....	25
7. Tahap penelitian.....	26
E. Manfaat penelitian.....	26
F. Keaslian penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Konsep legalitas.....	30
1. Sejarah perkembangan asas legalitas	35
2. Perkembangan asas legalitas di hukum pidana Indonesia.....	36
3. Perkembangan asas legalitas dalam hukum administrasi.....	35
B. Konsep penyitaan dan barang sitaan, temuan, rampasan.....	41
1. Benda sitaan / barang sitaan.....	42
2. Benda atau barang sitaan menjadi bagian penerimaan negara	

bukan pajak (PNBP).....	43
3. Terkait tempat penyimpanan.....	44
4. Penyitaan oleh Penyidik.....	46
5. Pengembalian benda sitaan	47
C. Konsep pengaturan penguasaan tanah.....	48
1. Politik hukum Agraria.....	49
2. Pengertian Tanah negara	57
3. Tanah yang dikuasai oleh instansi negara (TNI AD)	60
4. Hak menguasai negara	63
5. Peralihan hak atas tanah	68
6. Pendaftaran tanah	71
7. Tukar guling (<i>asser swap</i>).....	73
8. Kesejahteraan Rakyat.....	74
D. Landasan Teori.....	75
1. Teori Konstitusi.....	75
2. Teori Negara Hukum Modern... ..	75
3. Teori politik hukum.....	79
4. Teori Hukum Transisional	81
5. Teori Pembangunan.....	82
BAB III LEGALITAS PENYITAAN TANAH MILIK PERSEROAN TERBATAS PADA SAAT NEGARA DARURAT MILITER (STATE OF EMERGENCY) TAHUN 1966 YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK CERMAT.	
A. Legalitas penyitaan tanah milik Perseroan terbatas.....	84
1. Proses penyitaan.....	84
a. Blokir... ..	85
b. Penyitaan.....	98
c. Faktor pendukung Blokir dan penyitaan	102
2. Legalitas Proses penyitaan (dilihat dari kesesuaian aturan hukum. ..	113
a. Kesesuaian Hukum Administrasi	113
b. Kesesuaian Hukum Pidana.....	119
c. Kesesuaian Hukum Tata negara darurat.....	140
d. Kesesuaian Dengan Konstitusi.....	148
BAB IV UPAYA PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK SERTA	

PENGUASAAN TANAH OLEH INSTANSI NEGARA (TNI AD)	
KETIKA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT MILITER	
(State Of Emergency)	156
A. Prosedur peralihan hak atas tanah	156
B. Upaya Memperkuat Penguasaan tanah	158
C. Upaya mengalihkan hak milik atas tanah oleh TNI AD.....	162
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan... ..	186
B. Saran... ..	191
DAFTAR PUSTAKA... ..	192



ABSTRAK

LEGALITAS PENYITAAN TANAH MILIK PERUSAHAAN SAAT NEGARA BERADA DALAM KEADAAN DARURAT MILITER TAHUN 1966 (Studi Hukum Kritis : Hak Menguasai Negara atas Inbreng di PT PP Berdikari)

INTISARI

OLEH : HOTMAN CAPANDI, SH¹

Tujuan dari penelitian ini yaitu *Pertama* untuk meneliti lebih mendalam mengenai : Legalitas Penyitaan Tanah milik perseroan terbatas pada saat Negara darurat Militer (State Of Emergency) Tahun 1966 yang dilakukan secara tidak cermat. *Kedua*, untuk meneliti lebih mendalam Upaya peralihan hak atas tanah milik serta penguasaan tanah oleh instansi Negara (TNI AD) ketika Negara dalam keadaan darurat militer (State Of Emergency).

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, adapun sumber data yang di gunakan adalah bahan hukum sekunder berupa surat surat resmi instansi pemerintah yang berasal dari perolehan studi dokumen. Dalam menganalisis data menggunakan metode penalaran (logika) deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Kesimpulan dari penelitian ini, *pertama* legalitas pembelokiran & penyitaan tanah PT Karkam & PT Aslam berdasarkan sangkaan delik subversie ekonomi (*economic crimes*), Delik pidana korupsi dan delik makar terlibat G30S/PKI adalah Ilegal dan tidak terbukti berdasarkan ketentuan hukum pidana, hukum administrasi, hukum Tatanegara darurat dan konstitusi UUD 1945, penyitaan oleh militer tahun 1966 berdasarkan pernyataan negara dalam keadaan perang (*state of exception*) oleh Presiden 1 November 1965 Junto Undang- Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Pemerintah orde lama (1959-1965) yang bangkrut secara ekonomi dan keuangan. Pemerintah transisi (1966-1967) harus tetap membiayai kebijakan jalan keluar sesuai prinsip berdikari adalah menggunakan legitimasi Hak menguasai negara (HMN) untuk melakukan tindakan “*Transformasi keuangan dan sumber daya*” melalui Intervensi negara (*state led*) mencontohkan kesuksesan Nasionalisasi tahun 1958, berdasarkan Surat keputusan bersama (SKB) Waperdam Ekubang, dan waperdam Hankam Nomor Aa/EFESIAN/64/1966 Tanggal 16 Mei 1966 Tentang Tim Pengawas manajemen yang ditugasi untuk penguasaan, pengamanan, pengawasan dan pengelolaan perusahaan PT Karkam, PT Aslam & Co, kekayaan dan tanah yang merupakan Barang Sitaan Negara (BSN) Ex PT Karkam berdasarkan Keppres Nomor 31/1974 ditegaskan status harta kekayaan ex PT Karkam, PT Aslam & Co dijadikan penyertaan modal pemerintah (inbreng) di BUMN PT PP

¹ Mahasiswa S2 Konsentrasi hukum pidana, Magister Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

BERDIKARI berubah menjadi perseroan dengan PP Nomor 22 Tahun 2000 terhadap tanah girik milik adat yang ikut disita, status hak atas tanahnya tidak berubah menjadi tanah negara. Upaya pengalihan hak milik tanah girik malah menimbulkan sengketa yang berkembang menjadi tindak pidana pertanahan Korporasi BUMN.

Kunci : legalitas sita tanah, Hak menguasai negara (HMN), Negara Darurat Militer, Ekonomi Berdikari.



ABSTRACT

LEGALITY OF CONFISCATION OF LAND OWNED BY COMPANIES WHILE THE STATE WAS IN MARTIAL LAW IN 1966 (Critical Legal Studies : Rights State Control over Inbreng at PT PP Berdikari)

ABSTRACT

By : HOTMAN CAPANDI, SH¹

The purpose of this study is first to examine more in-depth about: The Legality of Confiscation of Land owned by a limited liability company during the State of Emergency (State Of Emergency) of 1966 which was carried out inaccurately. *Second*, to examine more deeply the efforts to transfer hak over land owned and land tenure by State agencies (TNI AD) when the State is in a state of emergency.

This research is empirical legal research, while the data sources used are secondary legal materials in the form of official letters from government agencies derived from the acquisition of document studies. In analyzing data using the deductive reasoning (logic) method, which is to draw conclusions from a problem that is general to the concrete problem that is faced by fire.

The conclusion of this study, *firstly* the legality of defection & confiscation of land of PT Karkam & PT Aslam based on the assumption of economic subversie *delik (economic crimes)*, corruption criminal offenses and treason offenses involved in G30S / PKI is Illegal and not proven based on provisions of criminal law, administrative law, emergency Constitutional law and the constitution of the 1945 Constitution, confiscation by the military in 1966 based on the state of war (state of *exception*) statement by the President of November 1, 1965 Junto Law Number 23 Prp of 1959 concerning the *state of danger*. The old order government (1959-1965) which went bankrupt economically and financially. The transitional government (1966-1967) must continue to finance the policy of the way out according to the principle of being independent is to use the legitimacy of the Right to control the state (HMN) to carry out actions "*Transformation of finances and resources*" through state intervention (*state led*) exemplifying the success of Nationalization in 1958, based on the joint decree (SKB) of WaperdamEkubang, and waperdam Hankam Number Aa / EFESIAN / 64/1966 dated May 16, 1966 concerning the management Supervisory Team assigned to the control, security, supervision and management of the company PT Kar kam, PT Aslam & Co, wealth and land which are State Confiscated Goods (BSN) ExPT Karkam based on Presidential Decree Number 31/1974 affirmed the status of assets wealth ex PT Karkam, PT Aslam & Co was used as a government

capital investment (inbreng) in state-owned enterprises PT PP BERDI KAR changed to a company with PP Number 22 of 2000 against customary girik land that was confiscated, the status of land rights did not change to state land. Efforts to transfer the property rights of girik land have caused disputes that have developed into land crimes of state-owned enterprises.

Keys: legality of land confiscation, Right to control the state (HMN), State of Martial Law, Independent Economy.



¹ S2 student concentration in criminal law, Master of Law, Faculty of Law, Christian University of Indonesia